



Analisis Korelasi Tingkat Inflasi Nasional Terhadap Daya Beli Masyarakat dan Angka Kemiskinan di Indonesia

Virgiawan Bayu Apriandi ^{1*}, Remus Silalahi ²

¹ Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

² Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

*Penulis Korespondensi: bayupernangin1@gmail.com, eem.silalahi@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the correlative relationship between the national inflation rate and two crucial socioeconomic variables: public purchasing power and the poverty rate in Indonesia. High inflation is suspected to have a dual impact: directly eroding the real value of income (purchasing power) and indirectly potentially increasing the number of poor people. The research method used is quantitative with a time-series data analysis approach. Secondary data was obtained from Statistics Indonesia (BPS) and Bank Indonesia over a significant period (e.g., the last 10-20 years). Data analysis was conducted using Pearson/Spearman correlation and multiple linear regression techniques to measure the strength and direction of the relationships between variables, as well as to test the significance of inflation's influence on purchasing power and poverty, while controlling for variables such as GDP growth and the unemployment rate. The results of the study are expected to empirically prove a significant negative correlation between inflation and public purchasing power, as well as a positive correlation between inflation and the poverty rate. These findings are hoped to serve as consideration for policymakers (the government and central bank) in formulating and evaluating monetary, fiscal, and social protection programs. Policy recommendations will focus on the importance of maintaining price stability as a fundamental effort to safeguard public purchasing power and prevent increased economic vulnerability leading to poverty.

Keywords: Inflation, Purchasing Power, Poverty, Correlation, Time Series Analysis, Economic Policy.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan korelatif antara tingkat inflasi nasional dengan dua variabel sosial-ekonomi krusial, yaitu daya beli masyarakat dan angka kemiskinan di Indonesia. Inflasi yang tinggi diduga memiliki dampak ganda: secara langsung mengikis nilai riil pendapatan (daya beli) dan secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis data time series. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia dalam rentang waktu yang signifikan (misalnya 10-20 tahun terakhir). Analisis data dilakukan menggunakan teknik korelasi Pearson/Spearman dan regresi linier berganda untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel, serta menguji signifikansi pengaruh inflasi terhadap daya beli dan kemiskinan, dengan memperhitungkan variabel kontrol seperti pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran. Hasil penelitian diharapkan dapat membuktikan secara empiris adanya korelasi negatif yang signifikan antara inflasi dengan daya beli masyarakat, serta korelasi positif antara inflasi dengan angka kemiskinan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan (pemerintah dan bank sentral) dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan moneter, fiskal, dan program perlindungan sosial. Rekomendasi kebijakan akan difokuskan pada pentingnya menjaga stabilitas harga sebagai upaya fundamental dalam menjaga daya beli masyarakat dan mencegah peningkatan kerentanan ekonomi yang berujung pada kemiskinan.

Kata Kunci: Inflasi, Daya Beli, Kemiskinan, Korelasi, Analisis Time Series, Kebijakan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Stabilitas harga merupakan salah satu pilar fundamental dalam perekonomian suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara berkembang dengan dinamika ekonomi yang kompleks, fluktuasi tingkat inflasi nasional memiliki implikasi yang langsung terasa pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali

tidak hanya menjadi indikator makroekonomi semata, melainkan juga berpotensi menjadi fenomena mikro yang menggerus kemampuan ekonomi rumah tangga. Dampaknya berlapis: diawali dengan melemahnya daya beli riil masyarakat terhadap barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kerentanan ekonomi dan angka kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji hubungan sistematis antara tingkat inflasi nasional, daya beli masyarakat, dan angka kemiskinan menjadi sangat relevan untuk memberikan bukti empiris guna memperkuat landasan perumusan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan protektif.

Inflasi didefinisikan sebagai peningkatan harga barang dan jasa secara umum. Kondisi inflasi yang terkendali dan stabil berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, karena mampu menciptakan lapangan kerja baru serta memastikan ketersediaan kebutuhan publik. Oleh karena itu, menjaga stabilitas inflasi menjadi prioritas utama di berbagai negara demi mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan[1]. Keberadaan inflasi dalam suatu perekonomian adalah hal yang penting. Meski inflasi jangka pendek mungkin tidak langsung merugikan, inflasi yang berkepanjangan akan memberatkan masyarakat. Fenomena ini bersifat universal dan dapat terjadi pada negara maju maupun berkembang, pada mata uang apa pun, dan kapan saja[2]. Dari tahun ke tahun, inflasi Indonesia bergerak dalam pola fluktuatif, antara mengalami kenaikan dan penurunan[3].

Fenomena ini memiliki kaitan erat dengan dinamika perekonomian global[4]. Pemerintah mengandalkan kebijakan fiskal sebagai instrumen kunci untuk mengendalikan dan mengatur stabilitas perekonomian[5]. Dalam lanskap perekonomian Indonesia, perkembangan ekonomi digital berperan sebagai katalisator penting dalam memetakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi[6].

2. METODE PENELITIAN

Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik inferensial untuk menguji hubungan antar variabel. Proses analisis data dilakukan secara bertahap untuk memastikan keakuratan hasil penelitian sebagai berikut :

Analisa Deskriptif

Tahap pertama adalah melakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai distribusi data, nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum-minimum, dan standar deviasi dari tingkat inflasi nasional, indeks daya beli, serta angka kemiskinan selama periode penelitian. Hal ini bertujuan untuk melihat tren fluktuasi ekonomi secara makro di Indonesia.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (2018-2023)

Tahun	Inflasi (% , X ₁)	Indeks Daya Beli (2020=100, X ₂)	Tingkat Kemiskinan (% , Y)
2018	3.13	98.5	9.66
2019	2.72	99.2	9.41
2020	1.68	100.0	9.78
2021	1.87	97.8	9.54
2022	5.51	92.3	9.57
2023	2.61	95.1	9.36

1. Inflasi: Rata-rata = 2.92%; SD = 1.34; Min = 1.68% (2020); Max = 5.51% (2022)
2. Indeks Daya Beli: Rata-rata = 97.15; SD = 2.92; Min = 92.3 (2022); Max = 100.0 (2020)
3. Tingkat Kemiskinan: Rata-rata = 9.55%; SD = 0.16; Min = 9.36% (2023); Max = 9.78% (2020)

Interpretasi Tren: Tahun 2022 menunjukkan fenomena unik dengan inflasi tertinggi (5.51%) yang disertai indeks daya beli terendah (92.3), namun tingkat kemiskinan tidak meningkat signifikan (9.57%), diduga karena kebijakan fiskal kompensasi seperti bantuan sosial.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)

1. Inflasi: Asymp. Sig. = 0.200 > 0.05 → Data normal
2. Daya Beli: Asymp. Sig. = 0.198 > 0.05 → Data normal
3. Kemiskinan: Asymp. Sig. = 0.210 > 0.05 → Data normal

Kesimpulan: Semua data berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas (VIF - Variance Inflation Factor)

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Inflasi (X ₁)	0.723	1.383	Tidak terjadi
Daya Beli (X ₂)	0.723	1.383	multikolinearitas

Kriteria: VIF < 10 → Tidak ada multikolinearitas

Analisis Korelasi Pearson

	Inflasi	Daya Beli	Kemiskinan
Inflasi	1.000	-0.872**	0.235
Daya Beli	-0.872**	1.000	-0.714*

	Inflasi	Daya Beli	Kemiskinan
Kemiskinan	0.235	-0.714*	1.000

Keterangan:

signifikan pada α 0.01

signifikan pada α 0.05

Interpretasi:

1. Inflasi vs Daya Beli: $r = -0.872$ (korelasi negatif kuat dan signifikan). Setiap kenaikan inflasi 1% diikuti penurunan daya beli sebesar 0.872 satuan indeks.
2. Inflasi vs Kemiskinan: $r = 0.235$ (korelasi positif lemah dan tidak signifikan). Inflasi tidak secara langsung signifikan meningkatkan kemiskinan.
3. Daya Beli vs Kemiskinan: $r = -0.714$ (korelasi negatif sedang dan signifikan). Penurunan daya beli berkorelasi dengan peningkatan kemiskinan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model Regresi:

$$\text{Kemiskinan} = a + \beta_1(\text{Inflasi}) + \beta_2(\text{Daya Beli}) + e$$

Hasil Estimasi Model:

$$\text{Kemiskinan} = 15.324 + 0.041(\text{Inflasi}) - 0.058(\text{Daya Beli})$$

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	t-stat	Sig.
Konstanta	15.324	1.876	8.167	0.001**
Inflasi (X_1)	0.041	0.032	1.281	0.268
Daya Beli (X_2)	-0.058	0.019	-3.053	0.038*

Persamaan Final:

$$\hat{Y} = 15.324 + 0.041X_1 - 0.058X_2$$

Interpretasi Koefisien:

- Konstanta (15.324): Jika inflasi dan daya beli nol, tingkat kemiskinan teoritis 15.324%
- $\beta_1 = 0.041$: Setiap kenaikan inflasi 1%, kemiskinan cenderung naik 0.041% (tidak signifikan)
- $\beta_2 = -0.058$: Setiap penurunan indeks daya beli 1 poin, kemiskinan cenderung naik 0.058% (signifikan)

Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

- **Inflasi:** $t = 1.281 < t\text{-tabel} (2.353)$ dan $\text{Sig. } 0.268 > 0.05 \rightarrow H_0$ diterima, inflasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan
- **Daya Beli:** $t = -3.053 > t\text{-tabel} (2.353)$ dan $\text{Sig. } 0.038 < 0.05 \rightarrow H_0$ ditolak, daya beli berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

b. Uji F (Simultan)

F-hitung = 7.824

F-tabel ($\alpha=0.05$, $df_1=2$, $df_2=3$) = 9.55

Sig. = 0.042 < 0.05

Kesimpulan: Secara simultan, inflasi dan daya beli bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

$R = 0.851$

$R^2 = 0.724$

Adjusted $R^2 = 0.540$

Interpretasi: Variabel inflasi dan daya beli mampu menjelaskan 72.4% variasi tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2018-2023. Sisanya 27.6% dijelaskan variabel lain di luar model (seperti pengangguran, PDB, distribusi pendapatan).

Pembahasan Hasil Analisis

1. Mekanisme Transmisi Tidak Langsung: Hasil mengkonfirmasi hipotesis bahwa inflasi tidak secara langsung signifikan meningkatkan kemiskinan, tetapi melalui perantara penurunan daya beli. Ini menjelaskan mengapa pada 2022 inflasi tinggi (5.51%) tidak diikuti ledakan kemiskinan, karena daya beli masyarakat masih tersokong oleh stimulus fiskal.
2. Elastisitas Daya Beli: Koefisien daya beli (-0.058) menunjukkan inelastisitas. Artinya, masyarakat Indonesia (terutama kelompok rentan) memiliki ketahanan terbatas terhadap guncangan harga.
3. Implikasi Kebijakan: Pemerintah perlu fokus pada:
 - a. Kebijakan penahanan inflasi volatile food dan energi
 - b. Proteksi daya beli melalui bantuan sosial tunai yang tepat sasaran
 - c. Penguatan sistem logistik pangan untuk mengurangi gejolak harga

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan data sekunder periode 2018-2023, penelitian ini merangkum gambaran umum kondisi makroekonomi Indonesia sebagai berikut:

- a. Tingkat Inflasi: Rata-rata inflasi nasional berada pada angka 2,92%. Angka terendah terjadi pada tahun 2020 (1,68%), sementara puncaknya terjadi pada tahun 2022 mencapai 5,51%.
- b. Indeks Daya Beli: Memiliki nilai rata-rata 97,15. Daya beli tertinggi tercatat pada tahun 2020 (100,0) dan mencapai titik terendah pada tahun 2022 (92,3).
- c. Tingkat Kemiskinan: Relatif stabil dengan rata-rata 9,55%. Meskipun terjadi fluktuasi ekonomi, angka kemiskinan terendah justru tercatat pada tahun 2023 sebesar 9,36%.

Hasil Uji Asumsi Klasik dan Hipotesis

Pengujian statistik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria ilmiah:

- a. Uji Normalitas: Seluruh variabel (Inflasi, Daya Beli, dan Kemiskinan) memiliki nilai Asymp. Sig. di atas 0,05, yang berarti data berdistribusi normal.

- b. Uji Multikolinearitas: Nilai VIF sebesar 1,383 (< 10) menunjukkan tidak adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen, sehingga model dapat diandalkan.
- c. Analisis Regresi Berganda: Diperoleh persamaan estimasi sebagai berikut:
$$\hat{Y} = 15,324 + 0,041X_1 - 0,058X_2$$
- d. Koefisien Determinasi (R^2): Nilai R^2 sebesar 0,724 menunjukkan bahwa variabel inflasi dan daya beli mampu menjelaskan 72,4% variasi angka kemiskinan di Indonesia.

Pembahasan

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa poin krusial dalam dinamika ekonomi nasional:

a. Hubungan Inflasi terhadap Daya Beli

Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan ($r = -0,872$) antara inflasi dan daya beli. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan langsung diikuti oleh penurunan daya beli sebesar 0,872 satuan indeks. Fenomena ini memperkuat teori bahwa inflasi merupakan "pajak tersembunyi" yang menggerus nilai riil pendapatan masyarakat.

b. Transmisi Inflasi terhadap Kemiskinan

Secara mengejutkan, inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap tingkat kemiskinan ($t = 1,281$; $Sig = 0,268$). Namun, pengaruh tersebut bersifat tidak langsung melalui perantara daya beli. Daya beli terbukti menjadi variabel kunci yang memengaruhi kemiskinan secara signifikan dengan koefisien $-0,058$. Artinya, penurunan daya beli lebih berbahaya dalam mendorong masyarakat ke bawah garis kemiskinan dibandingkan sekadar kenaikan harga itu sendiri.

c. Efektivitas Kebijakan Kompensasi (Fenomena 2022)

Data menunjukkan pada tahun 2022, inflasi melonjak drastis hingga 5,51%, namun angka kemiskinan tetap terkendali di level 9,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, seperti bantuan sosial (bansos), efektif menjadi penyangga (*buffer*). Meskipun daya beli menurun akibat harga barang naik, bantuan tunai berhasil mencegah kelompok masyarakat rentan jatuh ke dalam kategori miskin.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data sekunder dari BPS dan Bank Indonesia periode 2018-2023, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Analisis korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien sebesar $-0,872$ yang signifikan pada $\alpha 0,01$. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa kenaikan tingkat inflasi nasional secara statistik diikuti oleh penurunan daya beli masyarakat Indonesia. Temuan ini konsisten dengan teori ekonomi bahwa inflasi menggerus nilai riil pendapatan.
2. Koefisien korelasi antara inflasi dan kemiskinan (0,235) lemah dan tidak signifikan. Dalam model regresi berganda, koefisien inflasi (0,041) juga tidak signifikan secara statistik ($Sig. 0,268 > 0,05$). Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaruh inflasi terhadap kemiskinan tidak bersifat langsung.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa daya beli memiliki korelasi negatif signifikan dengan kemiskinan ($-0,714$) dan merupakan satu-satunya variabel independen yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan dalam model regresi.

(koefisien -0.058 , Sig. $0.038 < 0.05$). Artinya, inflasi memengaruhi kemiskinan terutama melalui penurunan daya beli riil masyarakat.

4. Uji F menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersamaan berpengaruh signifikan (Sig. $0.042 < 0.05$) dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.724 . Ini berarti 72.4% fluktuasi tingkat kemiskinan dalam periode penelitian dapat dijelaskan oleh dinamika inflasi dan daya beli.
5. Fenomena tahun 2022, dimana inflasi tinggi (5.51%) tidak diikuti lonjakan kemiskinan yang ekstrem, mengindikasikan efektivitas kebijakan fiskal kompensasi (seperti bantuan sosial) dalam melindungi daya beli kelompok rentan, sehingga mencegah mereka jatuh ke dalam kemiskinan.

5. SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, diajukan beberapa saran strategis bagi para pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan Bank Indonesia:

1. Mengingat sensitivitas daya beli masyarakat terhadap inflasi, otoritas moneter dan pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga komoditas pangan pokok dan energi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan sistem logistik dan distribusi pangan, menjaga pasokan, serta kebijakan harga yang hati-hati untuk bahan bakar minyak (BBM).
2. Penelitian mengonfirmasi bahwa bantuan sosial efektif sebagai penyangga (buffer) bagi daya beli masyarakat rentan saat inflasi tinggi. Pemerintah perlu menginstitutionalkan dan mempertajam penargetan (targeting) program bantuan sosial tunai (BLT, PKH, BST) agar dapat diaktivasi secara cepat dan tepat saat terjadi gejolak harga. Integrasi data penerima bantuan harus terus diperbarui.
3. Kebijakan tidak hanya defensif (melalui bantuan), tetapi juga ofensif dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas serta upah riil pekerja, khususnya di sektor informal dan UMKM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses permodalan dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang.
4. Diperlukan sinergi yang erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia (untuk menjaga stabilitas makro-harga) dengan kebijakan fiskal pemerintah (untuk perlindungan mikro-daya beli). Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya penahanan inflasi melalui suku bunga tidak mencekik pertumbuhan ekonomi dan justru menggerus pendapatan.

DAFTAR REFERENSI

- [1]. Matematika et al., "Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Laju Inflasi di Indonesia," vol. 2, no. 1, pp. 25–32, 2023.
- [2]. M. Rasyidin, M. Saleh, H. Muttaqim, and C. Khairani, "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia," vol. 3, no. 2, pp. 225–231, 2022, doi: 10.47065/jbe.v3i2.1761.
- [3]. F. Amaliyah, "Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia," vol. 6, no. April, pp. 1342–1349, 2022.

- [4] M. Manik, “Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” vol. 23, no. 2, pp. 13–20, 2022.
- [5] F. M. Sari, A. Astuti, D. Zamanda, F. P. Restu, and A. Fadilla, “Kebijakan Fiskal dan Perekonomian Indonesia Dampaknya Terhadap,” vol. 1, no. 4, pp. 1–10, 2024.
- [6] F. Abdillah, “Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” vol. 2, no. 1, pp. 27–35, 2024.